

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan bangsa Indonesia dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah melakukan berbagai strategi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia yang diamanatkan pembukaan UUD 1945. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa Yunani yang merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Strategi sendiri didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada jangka panjang organisasi disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai menurut Marrus (2002).

Strategi dapat dikatakan sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang dilakukan oleh pemerintahan menurut Mahfudz, (2015:5) sedangkan secara harafiah istilah pemerintahan atau dalam bahasa Inggris adalah padanan kata dari *government*. Lembaga atau badan publik yang memiliki fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara menurut Nawawi (2015:18).

Salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang itu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Di masa sekarang pertumbuhan ekonomi sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi daerah dan negara. Dalam hal ini kegiatan Usaha Micro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bidang usaha yang dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian nasional. Menurut (Ondang, 2019) UMKM adalah suatu usaha yang bergerak di berbagai bidang usaha yang berperan penting terhadap masyarakat, karena dapat mendorong laju pertumbuhan

ekonomi dan penyerapan tenaga kerja disuatu daerah. Peran UMKM dalam perekonomian nasional adalah: 1. Sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi; 2. Penyedia lapangan kerja; 3. Pemain utama dalam pengembangan kegiatan ekonomi dan sebagai pemberdayaan masyarakat; 4. Pencipta pasar baru atau sumber inovasi; 5. Hasil yang di dapat dari kegiatan ekspor yang menjaga neraca pembayaran (UKM, 2005). pada suatu negara atau daerah peran UMKM tidak dapat diabaikan terutama dalam melaksanakan pembangunan ekonomi. Apalagi ekonomi daerah pada umumnya ditopang oleh kegiatan berskala kecil dan menengah, hal itulah yang membuat UMKM menjadi urat nadi di perkonomian daerah maupun nasional, hal itu diperkuat dengan data dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa lebih dari 99% unit usaha yang ada dapat digolongkan sebagai UMKM dan 97% tenaga kerja di Indonesia bekerja di kelompok usaha ini.

Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona. Berdasarkan info dari Kementrian Koperasi dan UKM(Kemenkop UKM) (Kompas, 27 Maret 2020), setidaknya terdapat 949 laporan dari pelaku koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena dampak wabah virus Corona (Covid 19). Teten Masduki, Mentri Koperasi dan UMKM pun mengajak semua pihak termasuk swasta, BUMN, serta masyarakat untuk membantu para pelaku UMKM untuk bisa tetap produktif di tengah pandemi Covid 19. Terlebih, ada puluhan juta unit usaha di sektor mikro. Jika hal ini tidak ditangani, tentunya hal tersebut akan menjadi persoalan yang besar. Pandemi Covid 19 juga berdampak sangat besar yang terjadi adalah lumpuhnya aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak sekali sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memperkerjakan warga sekitar terpaksa terhenti karena pandemi covid 19, yang mengakibatkan hilangnya mata pencaharian warga.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, UMKM memberi sekitar 87% kontribusi

ke dalam sejumlah badan usaha di Indonesia dan memiliki andil sebesar 85% dalam penyerapan tenaga kerja (Murdani dkk, 2019). Dengan membangkitkan dan memperbanyak orang atau pengusaha baru di bidang UKM, dapat memberi manfaat bagi perekonomian keluarga dan masyarakat, juga dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja baru bagi masyarakat (Wahyudi, 2012).

Sejauh ini perkembangan UMKM DIY berdasarkan data statistik 2015, UMKM di DIY ada 220 ribu. Tahun 2018 meningkat menjadi 250 ribu, dari jumlah itu 26% diantaranya tersebar di Kabupaten Bantul dengan jumlah sebanyak 62 ribu UMKM (BANTUL, KRJOGJA.com; 13 November 2019). Jika di Kabupaten Bantul masing-masing UMKM rata-rata melibatkan 3 orang pekerja seja maka 186.000 orang menganggur. Dengan upah minimum Kabupaten (UMK) Bantul tahun 2019 sebesar Rp. 1.649.800/bulan, maka penghasilan yang hilang diperkirakan sekitar Rp. 306.862.800.000 per bulan. Angka tersebut hanya memperhitungkan pendapatan pekerja, belum memperhitungkan keuntungan perusahaan. Belum termasuk juga kerugian dari sektor-sektor misalnya pariwisata, pertanian, keuangan dan sektor usaha lainnya. Data dari Kementrian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada minggu kedua bulan april 2020, memperlihatkan adanya 2,8 juta pekerja yang di PHK dan dirumahkan sebagai imbas dari covid 19. Mereka yang di PHK dan dirumahkan ini akan menambah jumlah pekerja rentan di Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya di sektor informal. Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 tercatat pekerja informal di Indonesia sebanyak 74,08 juta orang (57,27 %). Mereka merupakan kelompok yang paling beresiko menerima dampak krisis, karena pendapatan rata-rata mereka rendah dan tidak memiliki perlindungan sosial hingga kesehatan. Dalam perspektif ekonomi-politik, para pekerja informal ini adalah bagian dari cadangan pekerja atau surplus populasi relatif (Arika dkk, 2020).

Tetapi meskipun kelompok usaha UMKM ini menjadi urat nadi perekonomian nasional, namun setiap tahunnya kelompok ini menghadapi permasalahan guncangan ekonomi.

Pada kondisi dunia seperti sekarang dimana kondisi perekonomian yang tidak menentu, seringkali terjadi keterpurukan dalam dunia usaha, sehingga nantinya akan terjadi kemunduran pada sector ekonomi dan kehidupan. Tidak sedikit pula di masa sekarang banyak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami gulung tikar akibat berbagai hal. Seperti halnya pada masa sekarang kelompok usaha ini menghadapi masalah pandemic.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan bahwa 90% UMKM kegiatan usahanya terganggu akibat Covid-19. Menurut (Dr. HM. Noer Soetjipto, 2020) dalam bukunya yang berjudul Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi Covid-19 menjelaskan bahwa penurunan omzet yang terjadi pada pelaku UMKM disebabkan karena 63% daya beli masyarakat menurun, 46% takut membeli karena adanya aturan PSBB, 42% karena aturan jam operasional toko. Kemudian dampak dari penurunan omzet tersebut membuat 33% pelaku UMKM menghentikan produksinya, 19% menghabiskan stock barang yang dikembalikan, 8% melakukan produksi jika ada pesanan saja, dan 27% membuka usahanya dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Sementara itu, hasil survei dari beberapa Lembaga seperti BPS, Bappenas dan World Bank menunjukkan hasil tentang pandemic ini membuat banyak UMKM kesulitan dalam melunasi pinjaman serta membayar tagihan-tagihan dan gaji karyawannya, bahkan beberapa diantaranya terpaksa sampai harus melakukan tindakan PHK. Kendala lain yang dihadapi antara lain ialah kesulitan dalam memperoleh bahan baku, pemodal, pelanggan yang menurun, distribusi, serta produksi yang terhambat. (Rahajeng, 2021). Dari kondisi itu, dapat dilihat bahwa UMKM terdampak besar akibat pandemic covid-19, pelaku usaha yang sukses di era pandemic ini hanyalah pelaku usaha yang mampu beradaptasi, karena dimasa pandemic ini para pelaku usaha diwajibkan untuk memutar otak untuk berinovasi dalam memproduksi barang serta jasa sesuai dengan kebutuhan pasar.

Peranan pemerintah dalam kondisi pandemic seperti ini sangat diperlukan bagi UMKM untuk keberlangsungan usahanya. Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pelaku usaha UMKM yang perlu diperhatikan secara serius dan berkesinambungan, pemerintah perlu mengambil langkah- langkah yang strategis untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM di masa pandemi ini. Kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak positif dari segi kesehatan karena adanya penurunan jumlah Covid di Indonesia, namun berbanding terbalik untuk segi perekonomian. Para pelaku UMKM terpuruk karena tidak bisa melakukan usaha dan modalnya digunakan untuk keperluan sehari hari.

Dalam mengatasi masalah yang dihadapi UMKM di masa pandemic ini, Pemerintah sebagai salah satu pihak memiliki tanggung jawab dalam pemberdayaan UMKM, pemerintah berupaya menyediakan berbagai dorongan melalui kebijakn rekruturisasi pinjaman, tambahan bantuan modal, dukungan pembiayaan, keringanan pembayaran tagihan listrik dan masih banyak lainnya, dorongan itu dilakukan untuk pemulihan ekonomi di sector UMKM. Dari program bentuk perhatian pemerintah, pemerintah membuat program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dengan menglotorkan dana sebesar Rp. 112,84 triliun yang telah dinikmati 30jt pelaku UMKM di tahun 2020 kemudian di tahun 2021 pemerintah telah menganggarkan sebesar Rp.121,90 triliun. (Limanseto, 2021). dari program yang telah dilakukan pemerintah, diharapkan dapat mendorong UMKM untuk kembali pulih dimasa pandemic.

Kondisi ekonomi di Kabupaten Bantul pada saat pandemic sangat menurun. Dikarenakan banyak pengusaha yang gulung tikar yang di sebabkan adanya ppkm dan banyak orang yang mau keluar rumah takut terkena corona. Maka dari itu pemerintah harus melakukan pemberdayaan UMKM supaya ekonominya tidak turun drastis. Banyak UMKM yang tidak bisa menjual barangnya disebabkan adanya PPKM dan disini grafik perekonomiannya sangat

menurun. Pemerintah mengupayakan untuk bekerja dengan gojek untuk membantu UMKM agar tidak terlalu menurun drastis.

Daerah kabupaten Bantul pada masa pandemi memiliki penurunan pendapatan pada UMKM sampai 60% (Data wawancara Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bantul) UMKM Mikro dan UMKM Makro yang dikarenakan pemasaran dalam proses jual beli terhambat karena adanya virus covid 19 yang memberikan dampak negatif bagi berjalannya UMKM. Selain itu virus covid 19 ini juga menghambat kegiatan produksi UMKM yang disebabkan oleh kurangnya pemasukan untuk persiapan bahan-bahan produksi dalam UMKM.

Bagi Kabupaten Bantul kerja keras dan itikad baik pemerintah dalam pemberdayaan UMKM untuk bangkit di masa pandemic ini adalah hal yang wajib, dan juga setiap pemerintah daerah berperan besar dalam memberdayakan, mendorong dan juga membantu dengan memberikan kebijakan yang membawa dampak positif untuk para pelaku UMKM. Namun pada kenyataannya upaya Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di masa pandemi seperti sekarang tidaklah mudah banyak factor yang ikut serta dalam menghambat dalam pemberdayaan ini

Dalam situasi seperti ini, permasalahan-permasalahan UMKM di masa pandemic seperti ini harus mendapatkan penanganan dan perhatian yang lebih serius, dan juga factor factor yang mempengaruhi kebijakan perlu dilakukan upaya strategis sebagai solusi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti tentang ***“BAGAIMANA STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI MASA PANDEMI TAHUN 2020-2021”***.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana strategi pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui strategi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemic.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada kebijakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam membantu UMKM dimasa pandemi covid 19

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khusus ilmu pemerintahan, terutama dalam pemberian informasi tentang strategi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemic.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah daerah agar dapat menjadi pengetahuan dan perbaikan dalam pemberdayaan umkm

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran dan pengetahuan tentang strategi pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemic covid-19.